

**DAMPAK TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96
TAHUN 2018 TERHADAP STATUS PERKAWINAN PADA
KARTU KELUARGA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Mencapai Derajat Magister Hukum

MUHAMMAD TAUFIQULLATIF

NIM: 710520005



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

DAMPAK TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TERHADAP STATUS PERKAWINAN PADA KARTU KELUARGA

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD TAUFIQULLATIF

NIM 710520005

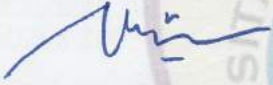
Magister Ilmu Hukum

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Seminar Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H.

NIP: 19760208 200312 2 002


Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.

NIP: 19740119 200112 1 001

Gorontalo, 23 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister

Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo



Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.

NIP: 19741223 200312 2 011






LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
PANITIA SEMINAR TESIS

**DAMPAK TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN
2018 TERHADAP STATUS PERKAWINAN PADA KARTU KELUARGA**

Disusun dan Diajukan Oleh:
MUHAMMAD TAUFIQULLATIF
NIM 710520005

**Telah Disetujui dan Disahkan oleh Panitia Seminar Tesis
pada Tanggal 23 Desember 2021**

KOMISI PENGUJI

<u>Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.</u> NIP: 19741223 200312 2 011	Ketua Program Studi	()
<u>Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H.</u> NIP: 19760208 200312 2 002	Pembimbing I	()
<u>Dr. Fence M. Wuntu, S.H., M.H.</u> NIP: 19740119 200112 1 001	Pembimbing II	()
<u>Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.</u> NIP: 19741223 200312 2 011	Penguji I	()
<u>Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H.</u>	Penguji II	()

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo


Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
NIP: 19591227 18603 2 003

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

TESIS

**DAMPAK TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN
2018 TERHADAP STATUS PERKAWINAN PADA KARTU KELUARGA**

Disusun dan Diajukan Oleh:
MUHAMMAD TAUFIQULLATIF
NIM 710520005

Disetujui untuk Diajukan kepada Panitia Ujian untuk Memperoleh Gelar Magister pada
Program Studi Ilmu Hukum

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H.

NIP: 19760208 200312 2 002



Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.

NIP: 19740119 200112 1 001

Gorontalo, 23 Desember 2021

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si.

NIP: 19591227 18603 2 003

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum



Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.

NIP: 19741223 200312 2 011

Abstrak

Muhammad Taufiqullatif. 2021. *Dampak Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status Perkawinan pada Kartu Keluarga. Program Studi Ilmu Hukum*. Pembimbing I: Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H. dan Pembimbing II: Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peraturan pencatatan pernikahan menurut hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menemukan dampak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 terhadap pencatatan status perkawinan pada kartu keluarga.

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah, komparatif, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, sosialisasi administrasi kependudukan, data dari instansi terkait, buku dan jurnal ilmiah. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif, argumentatif, dan evaluatif

Hasil penelitian ini adalah telah terjadi konflik norma antara peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang harus dicatatkan dan perkawinan yang tidak tercatat namun dapat dicatatkan. Peraturan yang lebih rendah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Akibat dari adanya konflik norma tersebut berdampak pada kerancuan akta autentik, yaitu kartu keluarga dan tidak terpenuhinya hak-hak bagi perempuan dan anak, baik dalam perkawinan maupun pascaperceraian. Jika kebijakan ini akan dilanjutkan maka harus diperbaiki mekanisme dalam pemeriksaan keabsahan pernikahan. Kartu keluarga yang dibuat tidak berdasarkan kutipan akta nikah harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan keabsahan pernikahan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Keabsahan pernikahan lebih penting daripada pencatatan pernikahan, namun pencatatan pernikahan tidak boleh diabaikan demi perlindungan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Kartu Keluarga, Pencatatan, Perkawinan*

Abstract

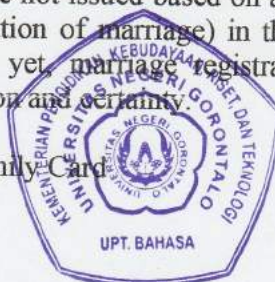
Muhammad Taufiqullatif. 2021. *The Impact of the Issuance of Presidential Regulation Number 96 of 2018 on Marital Status listed on a Family Card*. Study Program of Law. The Principal Supervisor is Dr. Nur Mohamad Kasim, S. Ag., M.H. and the Co Supervisor is Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H. Study Program of Law, Postgraduate Program, State University of Gorontalo.

This research aims at describing the marriage registration according to the laws and regulations of Indonesia and finding out the impact of the issuance of Presidential Regulation Number 96 of 2018 on marital status listed on a family card.

This research employs a normative method using statutory, historical, comparative, and case approaches. The legal materials are in the form of statutory regulations, outreach activities about the population administration, data from related parties, books, and scientific journals. Techniques of data analysis are descriptive, argumentative, and evaluative.

Findings reveal that there has been a conflict norm between the regulations governing marital status that must be registered and the registrable ones. The weaker regulation should have not opposed the stronger regulation. As a result, it impacts the confusion of authentic deeds such as the family cards and the unfulfilled rights of women and children in the course of marriage and after a divorce. This policy may be continued by improving the mechanism in examining marriage validity. Family cards that are not issued based on a marriage certificate must be examined by isbat (confirmation of marriage) in the Religious Courts. Legitimacy in marriage is essential, yet, marriage registration should not be neglected for the sake of legal protection and certainty.

Keywords: Registration, Marriage, Family Card



PERNYATAAN KEORISINALAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufiqullatif
NIM : 710520005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program : Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
Angkatan : 2020

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa tesis yang berjudul **“Dampak Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status Perkawinan pada Kartu Keluarga”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) maupun Strata Dua (S2), baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lainnya, kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian tesis ini.
3. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan/referensi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Semua isi dari tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Gorontalo, 23 Desember 2021



g membuat pernyataan

Muhammad Taufiqullatif

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Negeri Gorontalo. Selawat serta salam selalu kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., nabi akhir zaman yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju zaman ber peradaban.

Penulis tertarik meneliti tentang status perkawinan pada kartu keluarga karena perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah yang menyebabkan suatu perbuatan haram menjadi halal dan perkawinan berakibat pada akibat hukum lainnya setelah akad nikah diucapkan sehingga pencatatannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Adanya Tesis yang berjudul **Dampak Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status Perkawinan pada Kartu Keluarga** diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum serta memberikan saran dan masukan kepada para Pejabat Pemangku kebijakan juga praktisi pada dinas terkait sehingga memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan diselesaikannya Tesis ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada

1. Bapak Dr. Eduart Wolok, ST., MT., selaku Rektor UNG;
2. Bapak Dr. Harto S. Malik, M. Hum, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Gorontalo;
3. Ibu Dr. Ir. Yuniati Koniyo, MP., selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Gorontalo;

4. Ibu Karmila Machmud, S.Pd. M.A., Ph.D, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Gorontalo;
5. Bapak Prof. Dr. Phil. Ikhfan Haris, M.Sc, selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo.
6. Ibu Prof. Dr. Ha. Asna Aneta, M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
7. Bapak Dr. Hasim, M.Si, selaku Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
8. Ibu Prof. Dr. Weny J.A. Musa, M.Si, selaku Wakil Direktur II Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
9. Ibu Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H, selaku Penguji I dan Ketua Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
10. Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H. dan Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
11. Bapak Duke Arie Widagdo, S.H.I., M.H. selaku Penguji II;
12. Seluruh Dosen Pengajar Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada Penulis;
13. Segenap pimpinan Pengadilan Agama Kwandang Bapak Warhan Latief, S.Ag., M.H., Bapak Rajabudin S.H.I., dan Ibu Sitriya Daud, S.H.I., M.H. yang telah memberikan izin dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kwandang yang telah memberikan semangat dalam menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

14. Bapak Muntasir dan Ibu Ribut Setyowati orang tua kandung Penulis, yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, dan memberikan nasehat dengan penuh kasih sayang sehingga Penulis meraih keberhasilan sampai saat ini;
15. Adikku Silvi Rizki Kurniawati yang telah menemani orang tua di saat Penulis melaksanakan tugas negara jauh dari kampung halaman;
16. Istriku Puji Pantirahayu dan anakku Hafiz Ihsan Sahallatif yang selalu menemani Penulis dalam suka dan duka;
17. Keluarga Besar Bani Mbah Nardi dan Keluarga Besar Bani Mbah Juremi yang selalu memberikan nasehat dan dukungan dalam berbagai keadaan;
18. Sunyoto dan Arsha Nurul Huda serta teman-teman mahasiswa S2 Ilmu Hukum Angkatan tahun 2020 yang telah saling membantu dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Swt., sementara Penulis hanyalah seorang manusia biasa tempat salah dan lupa sehingga jika terdapat kesalahan dalam karya tulis ini dengan segala kerendahan hati Penulis mohon maaf dan menerima kritik serta saran yang membangun untuk pengembangan diri Penulis pada khususnya.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis selalu dalam jalan yang benar, teguh, jujur, adil, dan berintegritas, serta selalu belajar untuk pengembangan diri untuk menggapai rida Allah Swt.

Gorontalo, 23 Desember 2021



Muhammad Taufiqullatif
NIM 710520005

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
PERNYATAAN KEORISINALAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Permasalahan.....	9
C. Rumusan Permasalahan.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Keorisinalan Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	13
A. Pernikahan dan Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan di Indonesia.....	13
B. Pembuatan Kartu Keluarga Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018.....	16
C. Evaluasi Terbitnya Perpres Nomor 96 Tahun 2018.....	18
D. Kerangka Berpikir.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian	27
C. Pendekatan Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data.....	31
BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian	32
A. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	32
1. Sejarah Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	32
2. Rekonstruksi Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	60
3. Implementasi Pembuatan Kartu Keluarga Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018.....	68
B. Dampak Terbitnya Perpres Nomor 96 Tahun 2018 terhadap Status Perkawinan pada Kartu Keluarga.....	82
1. Dampak Terhadap Pelayanan Publik dan Pembangunan.....	82
2. Dampak Terhadap Kewenangan Antarlembaga.....	87
3. Dampak Terhadap Administrasi Pencatatan Perkawinan.....	97
4. Dampak Terhadap Kesadaran Hukum Mencatatkan Perkawinan	106
5. Dampak Pembuktian Akta Autentik (Kartu Keluarga).....	112
6. Dampak Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terutama Dalam Perkawinan dan Pascaperceraian.....	122
BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.....	54
Tabel 4.2 Tabel Perbedaan Penentuan Status Perkawinan dan Dasar Hukumnya	64
Tabel 4.3 Perbedaan Kewenangan dan Tugas KUA, PA, dan Disdukcapil.....	93
Tabel 4.4 Jumlah Pasangan Menikah di KUA Sekabupaten Gorontalo Utara...	107
Tabel 4.5 Data Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Se-PTA Gorontalo dan Badilag	108
Tabel 4.6 Data Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang	110
Tabel 4.7 Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Kecamatan	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Penelitian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Lampiran II Surat Penelitian dari Binmas Islam Kementerian Agama Gorontalo
Utara

Lampiran III Surat Penelitian dari Pengadilan Agama Kwandang

Lampiran IV Dokumen-Dokumen Penunjang Data Kartu Keluarga

Lampiran V Surat Balasan Panitera Mahkamah Agung terhadap Surat Ditjen
Dukcapil

Lampiran VI Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

No.	Daftar Lambang dan Singkatan	Penjelasan
1.	Admindex	Administrasi Kependudukan
2.	Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3.	Ditjen Dukcapil	Direktorat Jendral Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4.	Inpres	Instruksi Presiden
5.	Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
6.	KHI	Kompilasi Hukum Islam
7.	KK	Kartu Keluarga
8.	Komnas	Komisi Nasional
9.	KUA	Kantor Urusan Agama
10.	MA	Mahkamah Agung
11.	MK	Mahkamah Konstitusi
12.	No	Nomor
13.	NTCR	Nikah Talak Cerai Rujuk
14.	PA	Pengadilan Agama
15.	Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
16.	Perpres	Peraturan Presiden
17.	PP	Peraturan Pemerintah
18.	PPN	Pegawai Pencatat Nikah
19.	SPTJM	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
20.	UU No	Undang-Undang Nomor
21.	UUD NRI	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
22.	UUP	Undang-Undang Perkawinan